

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan masyarakat

A. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Menurut (Mubarok dalam Hilda, 2018) pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu upaya dalam proses pemulihan atau peningkatan kemampuan pada suatu grup yang digunakan sesuai harkat dan martabat ketika melaksanakan tanggung jawab serta haknya sebagai anggota masyarakat. Adapun pendapat Menurut Ife (1995) dalam (Nindatu, 2019) bahwa pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depannya, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Konsep pemberdayaan digunakan dalam upaya peningkatan kapasitas suatu individu agar individu dapat memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia serta sumber daya alam di lingkungan sekitarnya sehingga diharapkan dari hal tersebut tercapai sebuah nilai kesejahteraan pada masyarakat. Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki perspektif lebih luas menurut Pearse dan Stiefel (1979): menghormati kebhinekaan, menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, peningkatan kemandirian, peningkatan ruang interaksi, penyediaan akses. Empowerment atau pemberdayaan merupakan salah satu strategi atau merupakan paradigma pembangunan yang dapat diterapkan dalam tindakan di masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kekuatan yang dimiliki dalam sebuah Pembangunan berasal dari kegagalan yang dirasakan dengan proses dan implmentasi pengembangan dasar seperti pengembangan Masyarakat atau community development. Penguatan adalah sebuah upaya tindakan yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalisasi pemberdayaan (dalam arti kemampuan dan/atau keunggulan

bersaing dengan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu atau masyarakat yang mengalami kemiskinan).

Menurut (Mardikanto, 2015:61) dalam (arfianto, 2019 hlm 13) dalam Pemberdayaan mengacu pada kemampuan berpartisipasi dalam memperoleh peluang dan/atau menggunakan sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup (keduanya individu, kelompok dan masyarakat dalam arti yang lebih luas). Pada dasarnya pemberdayaan adalah sebuah upaya dalam menciptakan suasana atau ekosistem yang memungkinkan untuk masyarakat bisa berkembang baik itu secara sendirinya maupun melalui sebuah program. Logika ini didasari pada sebuah opini bahwa tidak ada masyarakat yang sepenuhnya tanpa kekuasaan, yang mana artinya setiap individu masyarakat memiliki kekuatan untuk memiliki keinginan berdaya, keinginan berkembang dan keinginan untuk tumbuh atas dirinya. Pembangunan Masyarakat harus menjadi tujuan dari sebuah pemberdayaan baik itu Pembangunan secara social, ekonomi,dll.

Secara substansial. Pemberdayaan adalah sebuah upaya memutus atau menghilangkan antara hubungan subjek dengan objek.. Proses ini mengutamakan subjek dalam hal kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara holistik, proses ini ingin meninjau seberapa pentingnya penyaluran daya (kekuatan) dari subjek ke objek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi obyek berubah sebagai subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antara subyek dengan subyek yang lain (Pranarka & Vidhyandika, 1996) dalam ((Yumna Sanayah Taqiyah1, 2021 hlm 15).

B. Tujuan Pemberdayaan masyarakat

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne dalam Alfitri, 1997:23).

Terlepas dari hal tersebut pemberdayaan juga bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang tidak tergantung pada eksternal. Dalam pemberdayaan masyarakat harus dituntut menjadi masyarakat yang mandiri (Self-reliance) dan berkelanjutan (Sustain), dimana dalam prosesnya masyarakat difokuskan kepada pengembangan kapasitas dirinya. Pengembangan kapasitas tersebut dikaitkan dengan potensi dan keinginan masyarakat tersebut seperti jenis dan kondisi usaha wilayah yang pada waktunya dapat menciptakan sebuah organisasi dan sistem oleh dan untuk masyarakat disekitarnya

Menurut (Tri Winarni, 1998:76) dalam (arfianto, 2019 hlm 13) untuk meningkatkan setiap efek untuk lebih banyak bagian anggota masyarakat yang kurang beruntung membantu membawa masyarakat lebih adil secara sosial dan memberdayakan anggota komunitas lokal secara struktural berdasarkan tempat. Artinya, sebuah upaya pemberdayaan Masyarakat dilakukan agar Pembangunan yang dilakukan baik itu social maupun ekonomi memberikan pengaruh yang merata pada seluruh Masyarakat bukan hanya pada satu individu saja. Di lingkungan Masyarakat terdapat perspektif yang lebih luas, dimana pemberdayaan dianggap seringkali disamakan dengan akuisisi kekuatan dan sumber daya untuk bertahan hidup. Padahal pemberdayaan dilakukan untuk bagaimana melakukan Pembangunan dengan secara masif dan merata.

Menurut (Sumodiningrat, 2009) dalam (Habib, 2021 hlm 4) Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha atau upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat dapat terlepas dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat dikatakan pemberdayaan bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam

mengembangkan masyarakat baik secara pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan.

Penyelesaian permasalahan tersebut biasanya dilakukan secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kapasitas masyarakat. Indikator keberhasilan sebuah pemberdayaan masyarakat dilihat berdasarkan adanya peningkatan pada pendapatan masyarakat dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan mengolah potensi lokal yang dimiliki di wilayahnya. Penguatan pada kapasitas masyarakat khususnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tersebut bertujuan untuk bagaimana kapasitas masyarakat dapat mendorong prospek perekonomian sehingga masyarakat dapat sejahtera secara mandiri

Pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan ketika di dalam suatu kondisi wilayah atau masyarakat mengalami situasi sosial dan ekonomi yang buruk sehingga menyebabkan ketidakberdayaan secara ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut ditandai dengan ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan pengembangan pada masyarakat dalam aspek pengembangan potensi atau keterampilan dan karakter sehingga masyarakat dapat bisa memaksimalkan yang ada pada dirinya untuk dapat menjadi pendorong dirinya untuk produktif. Pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat tidak selalu dilakukan pada satu individu tertentu melainkan dilakukan secara kelompok yang didalamnya terdapat masyarakat yang ingin berdaya dengan mencakup atau tidak terbatas pada kemampuan memelihara, keterampilan peternakan, kewirausahaan atau penciptaan usaha atau industri berbasis rumah tangga yang dimana dapat lebih banyak orang untuk bisa melakukan dan mengembangkannya.

Penguatan dalam pengembangan potensi adalah hal yang harus diperhatikan karena target dari sebuah pemberdayaan adalah bagaimana potensi

yang ada di masyarakat menjadi lebih kuat sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat yang ingin berkembang. Kerangka kerja ini juga memerlukan tindakan yang lebih positif yang mampu menciptakan suasana atau iklim yang optimis terhadap perubahan. Menurut (Kartasmita, 1997:5) Verifikasi ini berisi langkah-langkah spesifik dan berurusan dengan menghasilkan dan mengakses berbagai pendapatan ke berbagai kemungkinan yang dapat diciptakan nanti masyarakat semakin berkembang. Pengembangan yang dilakukan tidak terbatas pada pengembangan pertanian atau peternakan saja melainkan membuka sektor baru yang memang relevan dengan potensi yang ada di wilayahnya. Menurut (Santoso,2018) dalam (Genilangit, 2022 hlm 5) Pemberdayaan masyarakat wajib melibatkan warga setempat sebagai aktor utama, karena tujuan utama pemberdayaan masyarakat untuk melakukan peningkatan taraf hidup warga menjadi lebih baik lagi dengan memberikan pelatihan maupun lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi wilayah yang ada sehingga dapat menjamin taraf hidup warga secara berkesinambungan. Keterlibatan Masyarakat dalam sebuah pemberdayaan Masyarakat sangatlah penting karena selain menjadi objek, keberlanjutan sebuah program pemberdayaan Masyarakat bergantung pada tingkat partisipasi Masyarakat itu sendiri sehingga aspek partisipasi mesti diperhatikan.

C. Prinsip prinsip Pemberdayaan

Menurut (Mubyarto,1984 ; Sajogyo, 1982) Prinsip pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan. Pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subyek untuk mengenali permasalahan, ikut dalam perencanaan program akan menghasilkan kemandirian yang tinggi. Ada 4 prinsip yang digunakan dalam menerapkan sebuah program pemberdayaan yang diantaranya prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian dan berkelanjutan. Adapun pengertian dari prinsip prinsip pemberdayaan tersebut, yakni :

- 1) Kesetaraan

Menurut ahli Sosiologi (Haryanto, 2012 hlm 2) dalam (Belajar, 2023) disebutkan bahwa kesetaraan dalam kehidupan sosial merupakan tata politik sosial ketika semua orang dalam suatu masyarakat memiliki status yang sama. Kesetaraan merupakan prinsip utama yang mesti di pegang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kesetaraan merupakan sebuah kedudukan yang sejajar antara satu dengan yang lain baik itu lembaga pelaksana program dan masyarakat tanpa ada perbedaan didalamnya baik itu gender, status sosial, ekonomi, dll. Dalam hal ini yang berperan sebagai pemberdaya adalah pelaksana program/fasilitator seperti Pemerintah Desa, BUMDES atau pendamping, dan sasaran yang diberdayakan adalah masyarakat dengan berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda beda. Dalam prosesnya, antara pemberdaya dengan masyarakat yang diberdayakan tidak ada kesenjangan atau perbedaan.

2) Partisipasi

Menurut Suryana (2010) dalam (CANDRA, 2019 hlm 11) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan secara keseluruhan yang dilaksanakan mulai dari menganalisa masalah, menyusun rencana, pelaksanaan serta mengelola, monitoring dan mengevaluasi, hingga pemanfaatan hasil yang telah dicapai. Dalam program pemberdayaan nilai partisipasi sangatlah penting bagi keberlangsungan masyarakat. Sebuah program pemberdayaan yang mampu memberikan stimulus kepada masyarakat biasanya merupakan program yang bersifat partisipatif, terencana, terstruktur, terlaksana dan terevaluasi dengan baik oleh masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Hal tersebut dapat dicapai melalui adanya monitoring serta pengarahan yang dilakukan kepada masyarakat seperti halnya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi/pengembangan. Sampai saat ini, partisipasi merupakan tantangan dalam pemberdayaan, oleh karena itu untuk menarik perhatian dan partisipasi masyarakat sebuah program harus melalui perencanaan dan pengembangan yang matang.

3) Keswadayaan Atau Kemandirian

Menurut Chaplin (2002), dalam (Desmita, 2009:185) kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri. Kemandirian muncul berfungsi ketika peserta didik menemukan dirinya pada posisi yang menuntut suatu tingkat kepercayaan diri. Kemandirian berbeda dengan tidak tergantung, karena tidak tergantung merupakan bagian untuk memperoleh kemandirian. Keswadayaan merupakan salah satu cara yang dibuat berdasarkan rasa menghargai dan mendahulukan kemampuan masyarakat baik secara ekonomi, keilmuan atau keterampilan dalam upaya mengimplementasikan dan mengembangkan sebuah program atau proyek tanpa mengharapkan atau meminta bantuan dari pihak eksternal.

Keswadayaan merupakan sebuah bentuk budaya lokal secara mandiri yang menghargai nilai gotong royong dan saling melengkapi. Seseorang yang melakukan keswadayaan, mereka memiliki kemampuan untuk menyimpan keilmuannya secara mendalam terkait kendala atau hambatan dalam pengembangan usahanya, kondisi lingkungannya, serta memiliki rasa ingin tahu dan inisiatif yang tinggi. Hal tersebut merupakan nilai yang ada dalam prinsip kemandirian dan merupakan modal dasar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Bantuan eksternal yang diberikan baik bersifat materi atau tenaga harus dilihat sebagai pendorong masyarakat sehingga masyarakat tidak terlemahkan dan bergantung pada bantuan yang diberikan dan tidak melemahkan tingkat kemandirian masyarakat.

4) Berkelanjutan

Definisi Sustainable development menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam (Cahyani, 2020 hlm 4) yaitu “Sustainable development has been defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan

mereka. Prinsip keberlanjutan sangatlah penting dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai sebuah program pemberdayaan berlaku pada jangka waktu tertentu saja melainkan berkelanjutan dari waktu ke waktu atau masa ke masa sehingga program pemberdayaan yang diterapkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan memberikan peluang pada pengembangan di masa depan. Dalam hal ini, masyarakat harus memanfaatkan peran pendamping yang mana memiliki peran yang lebih dominan daripada yang lain. Keberlanjutan sebuah program dapat menandakan keberhasilan program yang diterapkan seperti adanya perubahan pada kehidupan masyarakat seperti taraf hidupnya, kualitas hidupnya, dll.

D. Model Pemberdayaan Masyarakat

Di negara negara berkembang saat ini mayoritas mereka selalu menggunakan berbagai macam model pemberdayaan. Hal tersebut bertujuan agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Model merupakan bentuk yang dibuat dan tentukan berdasarkan perencanaan program. Manifestasi dan identifikasi serta analisa yang dilakukan secara mendalam menghasilkan bentuk kerangka kerja yang terstruktur untuk mencapai perubahan atau kemajuan. Jika melihat pendapat lain, satu model hanya dapat digunakan pada masyarakat yang secara geografis memiliki kesamaan wilayah. Apabila dilihat dari berbagai sisi pembagian model pemberdayaan, dapat dikatakan bahwa setiap proses pemberdayaan menggunakan model yang sama hanya saja berbeda cara mengimplikasinya. Apalagi menurut penggunaan model pemberdayaan dalam penjelasan terdahulu ada tiga, yaitu: a. Sentralisasi b. Partisipasi c. Community development.

E. Tahapan Pemberdayaan masyarakat

Menurut Tim Delivery dalam (rindi, 2019) menyatakan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap 1, Seleksi lokasi. Seleksi lokasi/wilayah dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang telah di sepakati oleh beberapa pihak seperti lembaga, masyarakat, dan pihak pihak terkait lainnya.
- 2) Tahap 2, Sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pihak terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan
- 3) Tahap 3, Proses pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut, masyarakat melakukannya secara kelompok atau gotong royong dengan melakukan hal hal berikut seperti Kajian keadaan pedesaan partisipatif, Pengembangan kelompok, Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

F. Strategi pemberdayaan masyarakat

Menurut (Darmayanti, 2015), Strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kelompok

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diawali dengan pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini bertujuan agar masyarakat lemah diberikan kebebasan untuk membentuk dan beraktivitas dalam kegiatan yang mereka inginkan. Pembentukan kelompok memberikan suatu dasar bagi terciptanya interaksi sosial antara anggota kelompok

- 2) Pendampingan

Peran pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok di lapangan. Pendampingan

bertugas untuk mendampingi proses pembentukan dan pendampingan program, komunikator (Penghubung), dan dinamisator (penggerak). Dengan adanya pendampingan, kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan diharapkan tidak bergantung pada pendamping dan mampu tumbuh dan mandiri sebagai suatu kelompok

3) Perencanaan kegiatan

Setelah melalui tahapan sebelumnya, tahapan perencanaan kegiatan adalah tahapan yang melengkapi tahapan tahapan sebelumnya, dimana dalam tahap perencanaan kegiatan ini memetingkan peran aktif anggota masyarakat untuk dapat mencapai peningkatan pada taraf hidup masyarakat. Adapun Prinsip-prinsip penting dalam tahap perencanaan kegiatan ini yaitu, a. Prinsip keterpaduan. Dalam prinsip ini bagaimana suatu kegiatan pemberdayaan harus saling berkaitan dengan kegiatan kegiatan lain yang ada dalam lingkup daerah tersebut. b. Prinsip kepercayaan. Nilai kepercayaan dalam proses pemberdayaan merupakan sebuah hakikat yang harus ada di dalam setiap aktivitas pemberdayaan masyarakat. c. Prinsip kebersamaan dan gotong royong. Dalam kegiatan pemberdayaan disetiap prosesnya harus mampu menumbuhkan motivasi dan semangat antar anggota kelompok agar terciptanya rasa kekeluargaan dan memiliki satu sama lain. d. Prinsip kemandirian. Prinsip ini lebih menekankan pada bagaimana masyarakat dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri baik secara ekonomi maupun sosial.

G. Penerapan Pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan berbagai pendekatan menurut Edi Soeharto (2005:87) dalam (Suharto, 2014), Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dapat dilakukan melalui lima P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

- 1) Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Penciptaan kondisi yang memungkinkan ini bagaimana masyarakat Desa dapat berkembang lebih jauh dalam bidang ekonomi dengan menciptakan pemungkinan pemanfaatan potensi lokal yang ada di Desa.
- 2) Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masa dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Penguatan dapat berupa menjaga dan memperkuat keberhasilan atau capaian hasil yang telah diperoleh dalam proses pemberdayaan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
- 3) Perlindungan merupakan melindungi masyarakat terutama kelompok kelompok lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Perlindungan merupakan proses yang melindungi tahapan penguatan yang telah dicapai. Perlindungan ini menjaga agar tahapan penguatan yang telah dilakukan tidak mengalami kemunduran atau kegagalan. Hal ini dapat dilakukan melalui perlindungan secara hukum ataupun bentuk pengakuan lainnya.
- 4) Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Penyokongan dapat dilakukan melalui bimbingan dan pendampingan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memahami struktur peran dan fungsi kerjanya.
- 5) Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dengan menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Untuk

mencapai kondusifitas dan keseimbangan dilakukan melalui evaluasi terkait permasalahan yang terjadi.

Pada basisnya kegiatan pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah kegiatan yang terpaku pada pembekalan kemampuan/pengetahuan dan bantuan materi saja melainkan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah kegiatan yang dimana khusus untuk menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri sesuai dengan situasi dan kemampuan masyarakat yang dimilikinya. Namun dibalik hal tersebut, dalam proses pemberdayaan juga terdapat proses perencanaan secara bersama sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.2 Program kampung iklim (ProKlim)

A. Pengertian Program kampung iklim

Menurut St. Munadjat Danusaputra (Rizkiana, 2022) lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Berdasarkan Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup Nasional dalam rangka mendorong masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dapat dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat lokal seperti aksi adaptasi pengendalian banjir, longsor atau kekeringan, penampungan air hujan, peresapan air, perlindungan mata air, sarana jamban sehat, sarana penyediaan air bersih, sanitasi air bersih, pemanfaatan lahan pekarangan, pengendalian penyakit terkait iklim, perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan

aksi mitigasi dilakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sampah/limbah, penggunaan energi baru, budidaya pertanian rendah emisi GRK yang bisa meningkatkan target kegiatan penutupan lahan vegetasi serta upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mengatasinya permasalahan perubahan iklim disebut, oleh karena itulah ditetapkanlah Program kampung Iklim (ProKlim) sebagai program yang menjadi basis adaptasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim. Program kampung iklim berfokus pada pengembangan pengetahuan umum dan pemahaman tentang perubahan iklim dan dampak dampaknya terhadap kehidupan masyarakat masyarakat Agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya menerapkan sumber daya dan langkah-langkah ke dalam upaya adaptasi nyata untuk meningkatkan level tersebut. Kehidupan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasi diharapkan dapat mengurangi efek gas rumah kaca dan menghargai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan sebagaimana mestinya di tingkat lokal dalam wilayah perkotaan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No. P.39/MenlhkSetjen/2015 tentang Rencana Strategis KLHK Tahun 2015-2019, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPPI) dalam periode ini secara garis besar diarahkan pada: 1) Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 2) Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan; dan 3). Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim. Fasilitas desa/kelurahan yang menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) ditetapkan sebagai salah satu indikator capaian sasaran peningkatan wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dengan target sebanyak 2.000 desa/kelurahan, yang sekaligus juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran peningkatan efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

- 1) Upaya adaptasi perubahan iklim

Adaptasi perubahan iklim adalah salah satu bentuk upaya atau respon yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan suatu cara penyesuaian yang dilakukan secara terencana ataupun spontan, yang memberikan reaksi terhadap perubahan iklim (Murdiyarso, 2001). Upaya adaptasi dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerentanan manusia pada efek yang diberikan oleh perubahan iklim, dimana tingkat kejenuhan karbon yang cukup tinggi serta waktu tinggal karbon di atmosfer memakan waktu ratusan tahun, maka bumi secara natural memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan kembali pada suhu yang normal. Dengan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi akan memberikan dampak pada generasi saat ini dan generasi di masa depan. Bila fenomena perubahan iklim terus terjadi, bisa jadi sektor pertanian, peternakan, dll akan terdampak sehingga berpengaruh pada ketahanan pangan masyarakat dan ketahanan manusia terhadap perubahan iklim.

Upaya adaptasi dilakukan untuk bagaimana masyarakat memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam menghadapi perubahan iklim untuk mengurangi pemanasan global. Adapun beberapa komponen adaptasi dalam Proklamasi yaitu sebagai berikut:

- a) Pengendalian terhadap banjir, tanah longsor serta kekeringan
- b) Pengendalian penyakit terhadap iklim
- c) Pengendalian terhadap ketahanan pangan
- d) Antisipasi atau penanganan terhadap naiknya intrusi air laut, muka laut, rob, gelombang tinggi, abrasi dan abrasi dan berbagai kegiatan lain mengenai upaya peningkatan kesesuaian diri terhadap perubahan iklim.

2) Upaya mitigasi Perubahan iklim

Mitigasi merupakan upaya atau aktivitas pencegahan yang dilakukan untuk menekan dampak perubahan iklim seperti gas rumah kaca dan sebagainya agar dampak terjadinya perubahan iklim dapat dicegah ataupun diminimalisir. Tidak semua aksi mitigasi terhadap perubahan iklim merupakan aktivitas yang

tergolong berat, adapun beberapa upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar atau kelompok masyarakat kampung iklim. Perilaku masyarakat yang hemat energi, pengendalian kebakaran hutan, penanaman pohon, pengelolaan sampah yang baik dan sebagainya adalah contoh kegiatan mitigasi yang harus terus menerus dilaksanakan kepada seluruh pihak (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Adapun Komponen mitigasi dalam ProKlim:

- a) Pengelolaan sampah limbah padat dan cair
- b) Meningkatkan serta mempertahankan tutupan vegetasi
- c) Penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK
- d) Pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- e) Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi
- f) Dan berbagai kegiatan lain mengenai upaya penurunan emisi GRK

Untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim disebut, oleh karena itulah ditetapkanlah Program kampung Iklim (ProKlim) sebagai program yang menjadi basis adaptasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim. Program kampung iklim berfokus pada pengembangan pengetahuan umum dan pemahaman tentang perubahan iklim dan dampak dampaknya terhadap kehidupan masyarakat masyarakat Agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya menerapkan sumber daya dan langkah-langkah ke dalam upaya adaptasi nyata untuk meningkatkan level tersebut. Kehidupan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasi diharapkan dapat mengurangi efek gas rumah kaca dan menghargai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan sebagaimana mestinya di tingkat lokal dalam wilayah perkotaan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No. P.39/MenlhkSetjen/2015 tentang Rencana Strategis KLHK Tahun 2015-2019, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP) dalam periode ini secara garis besar diarahkan pada: 1) Meningkatnya efektifitas

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 2) Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan; dan 3) Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim. Fasilitasi desa/kelurahan yang menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) ditetapkan sebagai salah satu indikator capaian sasaran peningkatan wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dengan target sebanyak 2.000 desa/kelurahan, yang sekaligus juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran peningkatan efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

B. Tujuan Program kampung iklim

Program kampung iklim bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat terkait perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap fenomena perubahan iklim di wilayahnya. Tujuan Khusus Program Kampung Iklim adalah:

- 1) Meyadarkan dan mendorong kelompok masyarakat disuatu wilayah untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di tingkat lokal
- 2) Memberikan penghargaan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat.
- 3) Mendorong penyebarluasan informasi dan kegiatan adaptasi mitigasi program kampung iklim yang telah dilaksanakan diwilayah lain untuk dapat dijadikan contoh dan serta diterapkan diwilayah lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat

C. Manfaat Program kampung iklim

Adapun beberapa manfaat yang diberikan dari Program kampung iklim (ProKlim), yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim.

- 2) Meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan emisi GRK minimal.

2.2 Hasil penelitian yang relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian pada saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme atau mencontk secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu:

- 1) Penelitian skripsi. Nyoman Dedi sagita 2021 yang berjudul Implementasi program kampung iklim (Proklim) di Kelurahan kalidoni kota Palembang, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sriwijaya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan program kampung iklim (ProKlim) di Kelurahan kalidoni kota Palembang yang diteliti secara mendalam.
- 2) Penelitian Skripsi. Nabila Yumna Ghina 2017 yang berjudul Kampung Iklim: Pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat, Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis

pengelolaan lingkungan dimana pengelolaan lingkungannya melalui program kampung iklim. Ada beberapa aspek yang diangkat dalam penelitiannya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis tulis seperti aspek partisipasi masyarakat, pemberdayaan, kampung iklim dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga membahas terkait tahapan tahapan pemberdayaan masyarakat dan menggambarkan modal sosial dan partisipasi masyarakat pada Kampung Iklim, dan juga tindakan-tindakan yang dipakai oleh aktor Kampung Iklim dalam pelaksanaan ProKlim.

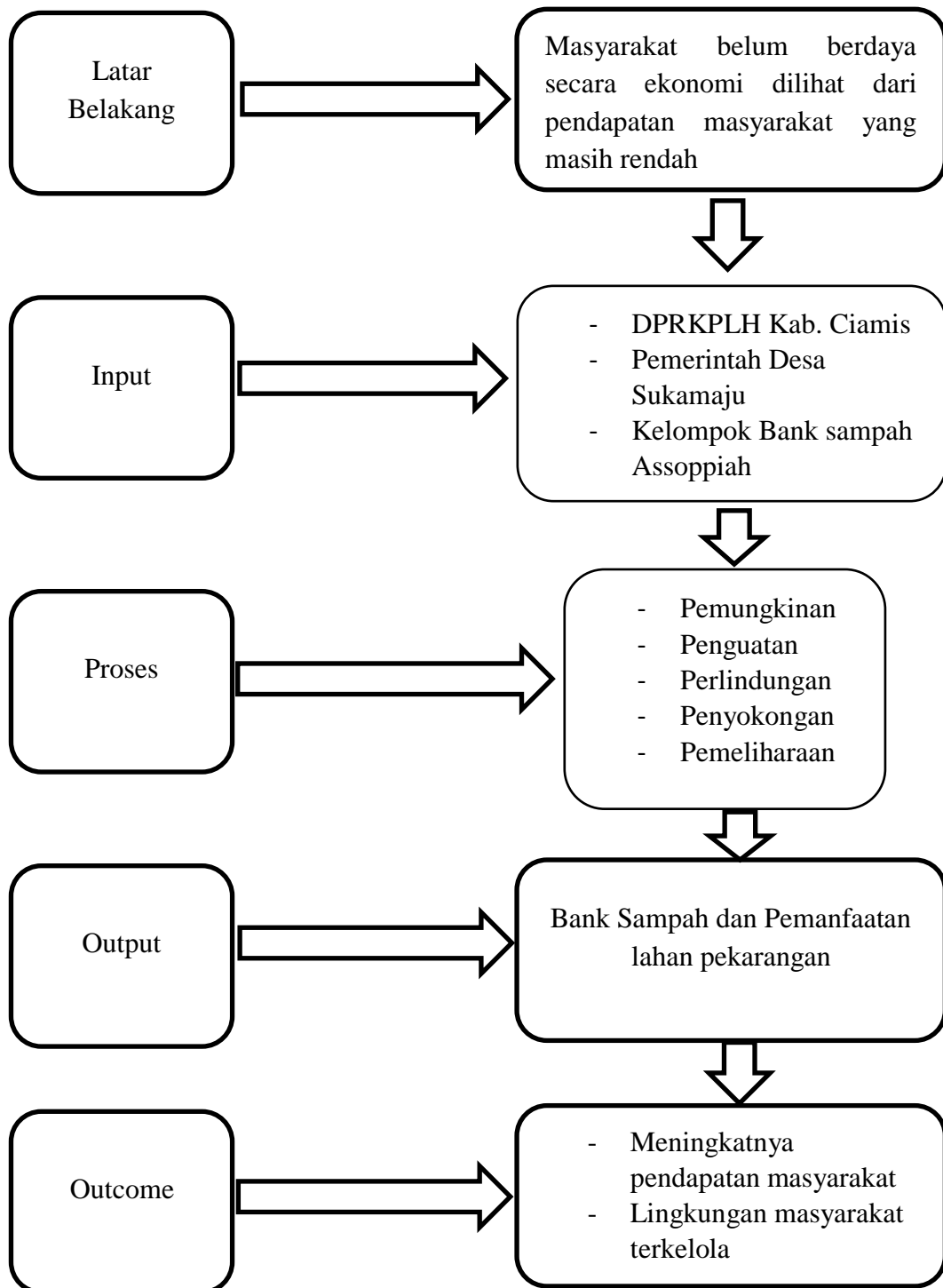
- 3) Penelitian Skripsi. Sarda Hayrani 2019 yang berjudul Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Kelurahan Lembah damai Kecamatan Rumbai pesisir, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sampah di lingkungan masyarakat. Ada beberapa hal yang dibahas dalam penelitian ini seperti pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah hingga penjualannya. Penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis karena dalam Program kampung iklim (ProKlim) terdapat aspek pengelolaan sampah.
- 4) Penelitian Skripsi. Dilla Useva 2019 yang berjudul Pemberdayaan masyarakat melalui Bank sampah berkah jaya V Kampung gaya baru III Kecamatan seputih Surabaya Kabupaten Lampung tengah, Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Pemberdayaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi aspek sosial dimana masyarakat diberdayakan melalui pengelolaan sampah sehingga bukan hanya dampak ekonomi saja yang diberikan melainkan dampak sosial dan lingkungan. Penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis, dimana terdapat nilai ProKlim didalamnya yakni pengelolaan sampah.

- 5) Penelitian Skripsi. Auliya Hesti Fitriana 2020 yang berjudul Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk agribisnis di Desa blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, Program studi pengembangan masyarakat islam Fakultas dakwah Institut agama islam negeri (IAIN) Salatiga. Penelitian ini membahas terkait pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pertanian mikro dengan memanfaatkan lahan pekarangan masyarakat. Hal ini sangat berhubungan dengan penelitian yang peneliti tulis karena pemanfaatan lahan merupakan salah satu nilai yang ada di Program kampung iklim (ProKlim).

2.3 Kerangka konseptual

Program kampung iklim merupakan program berlingkup nasional yang dibuat untuk masyarakat dapat melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim seperti kegiatan pengelolaan sampah, penanaman vegetasi, pemanfaatan lahan pekarangan, dll. Ada beberapa aspek yang ada di dalam Program kampung iklim (ProKlim) yakni aspek lingkungan, kesehatan, juga ekonomi. Oleh karena itu, Program kampung iklim dapat menjadi basis segala bentuk pembangunan khususnya pembangunan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis Program Kampung Iklim dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan khususnya terhadap upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, Program kampung iklim (ProKlim) dapat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat karena dalam program kampung iklim terdapat beberapa program yang dapat memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat seperti pengelolaan sampah melalui program bank sampah, pemanfaatan lahan pekarangan, dll.



Gambar 2.3.1 Kerangka konseptual

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka kerja penelitian mengenai: Pemberdayaan masyarakat melalui Program kampung iklim (ProKlim) dalam pengelolaan lingkungan di Desa sukamaju.

Berdasarkan dari **Gambar 2.3.1** Kerangka konseptual penelitian menggambarkan kerangka berpikir dari penelitian ini. Desa sukamaju merupakan salah satu desa yang mengikuti Program kampung iklim yang mana merupakan program Dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup, dimana fokus pengembangan proklam biasanya dilakukan di satu dusun. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yakni Minimnya pendapatan masyarakat dilihat dari kecilnya penghasilan yang didapatkan perharinya.

Untuk itu Pemerintah Desa sukamaju bekerja sama dengan Dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup (DPRKPLH) untuk menerapkan Program kampung iklim sebagai basis Pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program kampung iklim dalam prosesnya masyarakat akan diberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi terkait apa itu program kampung iklim mulai dari proses dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Selain itu, nantinya masyarakat akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator yang ada di DPRKPLH. Melalui Program kampung iklim (ProKlim) ini, Apabila pemberdayaan dan pengelolaan lingkungan yang menjadi target utama pengembangannya, maka ada 2 program yang relevan dengan permasalahan tersebut yakni Program bank sampah dan program pemanfaatan lahan pekarangan. Setelah melakukan sosialisasi, Tahap lanjutan dalam pengimplementasiannya Pendamping/fasilitator akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam membentuk kelompok masyarakat untuk

program yang akan di terapkan tersebut sehingga masyarakatlah yang akan menerapkan programnya mulai dari perencanaan hingga pengembangan.

Dengan kedua program tersebut, masyarakat dapat memperoleh pendapatan baru sehingga tingkat pendapatan masyarakat bertambah dan secara otomatis dengan kedua program tersebut lingkungan masyarakat pun dapat terkelola baik sampahnya maupun lingkungan rumah masyarakatnya.

2.4 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan Rumusan masalah diatas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah: Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program kampung iklim dalam pengelolaan lingkungan di Desa sukamaju?